

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Suatu masalah mendasar dan menjadi fokus utama berbagai pemerintahan di dunia ini ialah kemiskinan, bahkan negara yang telah maju pun masih mengalami kesulitan dalam mengentaskan kemiskinan. Tak terkecuali pemerintah Indonesia yang masih tergolong ke dalam negara berkembang. Di Nigeria, jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi miskin terkonsentrasi di wilayah pedesaan, dan hal ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap layanan sosial dan ekonomi (Osinubi, 2003). Penelitian oleh Okwi et al (2007) mengungkapkan bahwa faktor geografis memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan kemiskinan di Kenya. Sementara itu, penelitian oleh Bruck et al (2007) mengindikasikan bahwa kurangnya keterampilan yang memadai mendorong masyarakat miskin kesulitan bersaing dengan angkatan kerja lain di Ukraina.

Kemiskinan telah menjadi permasalahan yang berkepanjangan, dan berbagai usaha telah dikerahkan oleh pemerintah pusat dan daerah guna menguranginya. Isu kemiskinan merupakan permasalahan pokok dalam pembangunan. Pada pasal 27 ayat (2) di dalam Konstitusi Indonesia tahun 1945, tiap warga negara Indonesia memiliki hak mendapat pekerjaan serta tingkat penghidupan yang layak. Ini menandakan pemerintah Indonesia memiliki kewajiban menjaga kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) termasuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh seluruh warga negaranya.

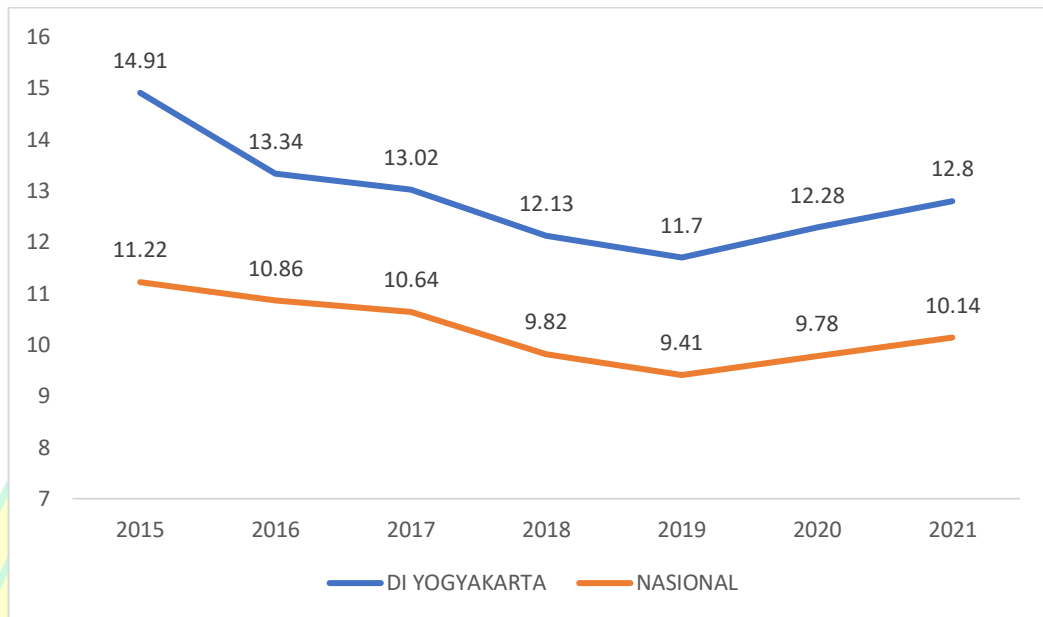
Secara umum, penyebab adanya kemiskinan dikarenakan terdapat beragam kebutuhan manusia, serta ketidaksetaraan dalam kepemilikan berbagai sumber daya yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam persebaran pendapatan. Kemiskinan adalah keadaan di mana individu atau kelompok tidak

mampu dalam pemenuhan berbagai kebutuhan dasar kehidupan, terutama terhadap konsumsi sehari-hari dan pendapatan (Jacobus et al., 2018). Definisi kemiskinan juga mencakup situasi seseorang atau segelintir orang hidup dengan standar hidup yang rendah, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan memenuhi hak dasar layaknya makanan dan barang non-pangan, serta kekurangan kemampuan, kebebasan, aset, dan akses ke layanan publik, peluang kerja, dan usaha, serta memiliki kerentanan terhadap risiko penyakit (Pratama, 2014).

Mengatasi masalah kemiskinan harus dilakukan dengan komprehensif. Hal ini tidak bisa dilakukan secara terpisah dari sejumlah permasalahan lain seperti pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan isu-isu terkait lainnya yang erat hubungannya dengan masalah tersebut yang dengan demikian dibutuhkan pendekatan yang efektif harus melibatkan berbagai sektor, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan mengintegrasikan berbagai aspek secara terpadu dan terkoordinasi. (Annur, 2013).

Secara nasional, angka kemiskinan Indonesia 2015-2021 mengalami fluktuasi, namun cenderung terjadi penurunan hingga tahun 2019. Kecenderungan hal tersebut merupakan hasil dari berbagai kebijakan pemerintah Indonesia yang berdampak baik pada meningkatnya kemampuan yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya, peningkatan angka kemiskinan disebabkan oleh inflasi yang muncul sebagai dampak dari munculnya pandemi.

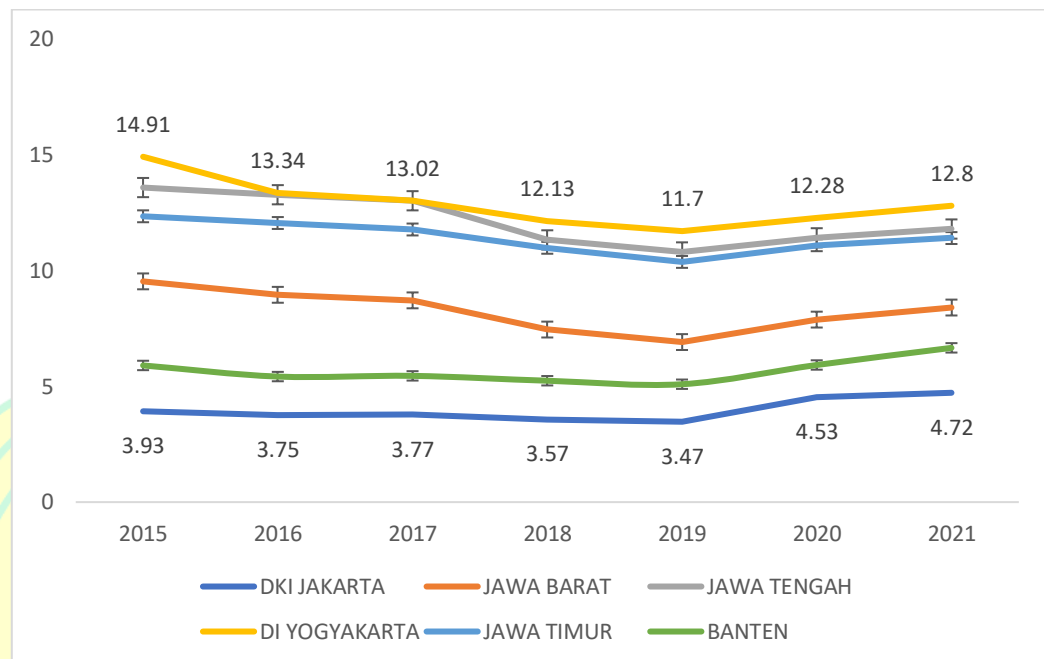
Permasalahan kemiskinan tidak hanya merupakan isu di tingkat nasional, tetapi juga melibatkan berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Salah satu contohnya adalah Provinsi DI Yogyakarta (DIY), yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi. Selama periode 2015-2021, persentase penduduk miskin di DIY mengalami fluktuasi, dengan data sebagai berikut:



Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Menurut Badan Pusat Statistik, ambang batas kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta (DIY) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ambang batas kemiskinan nasional. Pada tahun 2021, persentase kemiskinan di DIY mencapai 12,8%, sedangkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,14%. Pemerintah DIY terus mengupayakan pengentasan isu kemiskinan tersebut. Namun, upaya tersebut masih belum efektif dan berhasil yang dapat dilihat melalui data yang masih tinggi dengan presentase diatas sepuluh persen.



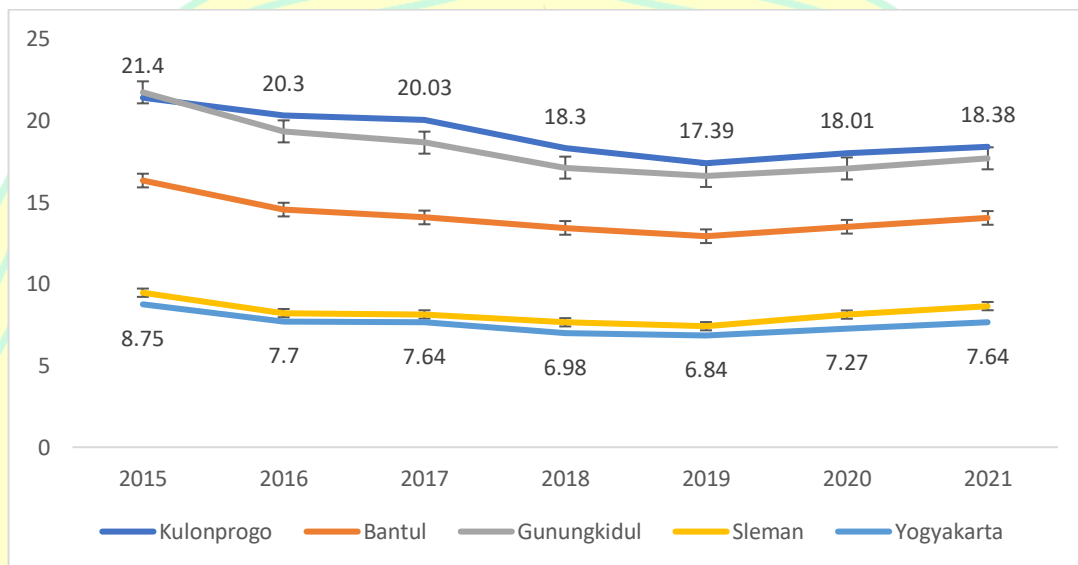
Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan Gambar 1.2, terdapat tiga provinsi di wilayah Pulau Jawa dengan persentase kemiskinan di atas angka kemiskinan nasional yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan ekonomi di Indonesia sebagian besar berpusat di Pulau Jawa, namun kenyataannya 50% provinsi di Pulau Jawa mengalami kemiskinan dengan presentase penduduk miskin diatas angka kemiskinan nasional. Dari enam provinsi yang ada di wilayah Pulau Jawa, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi provinsi paling miskin selama kurun waktu 2015-2021. Oleh karena itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap belum berhasil dalam pembangunan ekonominya terutama dalam pengentasan kemiskinan.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 1 Kota dan 4 Kabupaten yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, serta Kabupaten Gunungkidul. Sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai jumlah

penduduk miskin yang tinggi, hanya beberapa kabupaten saja yang mempunyai jumlah penduduk miskin rendah. Perbedaan jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten/kota tersebut dapat menjadi acuan seberapa besar masalah dan hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan.



Gambar 1.3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

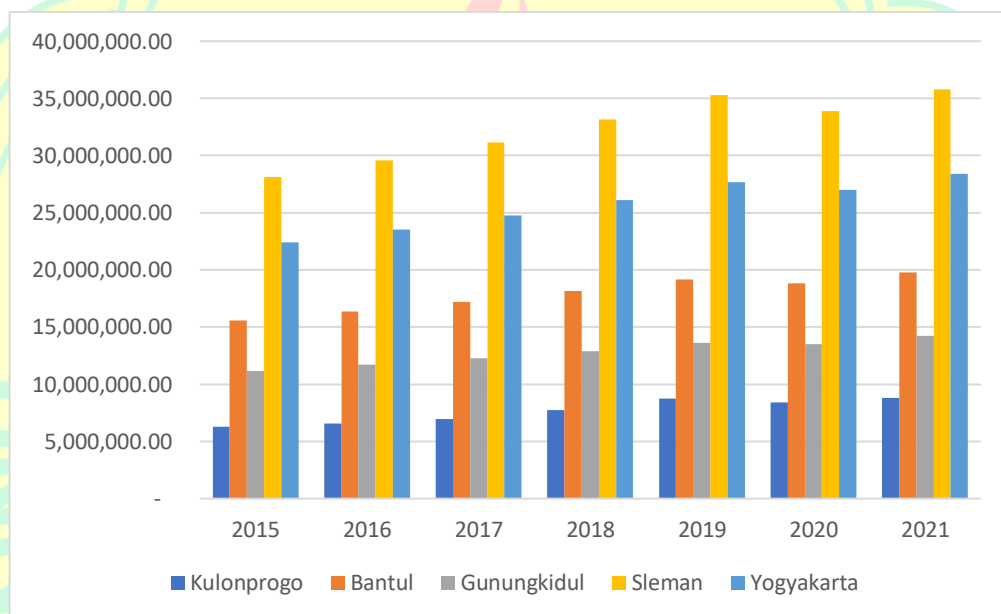
Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan Gambar diatas, Meskipun pusat ekonomi Indonesia sebagian besar berada di Pulau Jawa, data statistik menunjukkan bahwa setengah dari jumlah provinsi di Pulau Jawa menghadapi masalah kemiskinan dengan presentase penduduk miskin yang relatif lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional. Provinsi DIY merupakan provinsi termiskin di pulau Jawa dari tahun 2015 hingga 2021. Oleh karena itu, Provinsi DI Yogyakarta belum berhasil mengembangkan perekonomiannya, khususnya dalam hal mengentaskan masalah kemiskinan.

Provinsi DI Yogyakarta meliputi 5 Kabupaten/Kota diantaranya dari Kota Yogyakarta dan beberapa kabupaten yakni Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Sleman, dan Gunungkidul. Hanya beberapa kabupaten dengan

presentase penduduk miskin yang rendah, dengan sebagian lainnya memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi.

Maka dari itu, diperlukan beberapa isu dan langkah utama yang harus dilakukan pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan karena adanya disparitas presentase penduduk miskin di tiap-tiap kabupaten atau kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

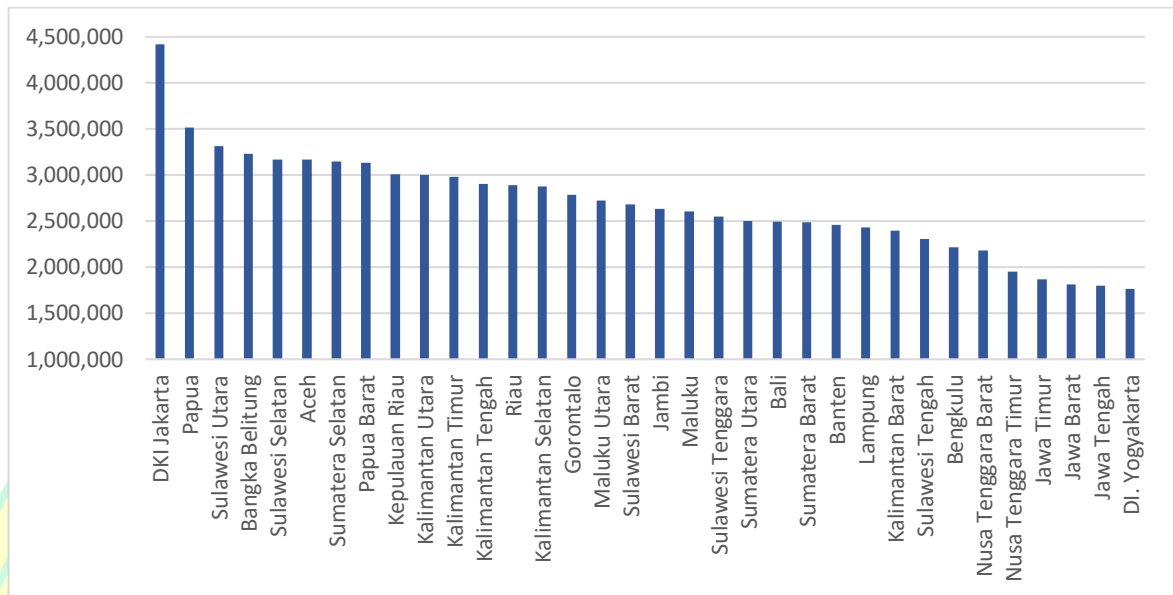


Gambar 1.4 PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Di Provinsi DIY, terdapat perbedaan dalam distribusi output dari pertumbuhan yang tidak sama antara wilayah yang berbeda. Selain itu, terdapat perbedaan standar hidup minimum karena faktor-faktor seperti infrastruktur transportasi, medan geopolitik, dan perbedaan tingkat pembangunan di dalam suatu wilayah, baik yang disebabkan oleh masalah aksesibilitas maupun kemudahan akses.

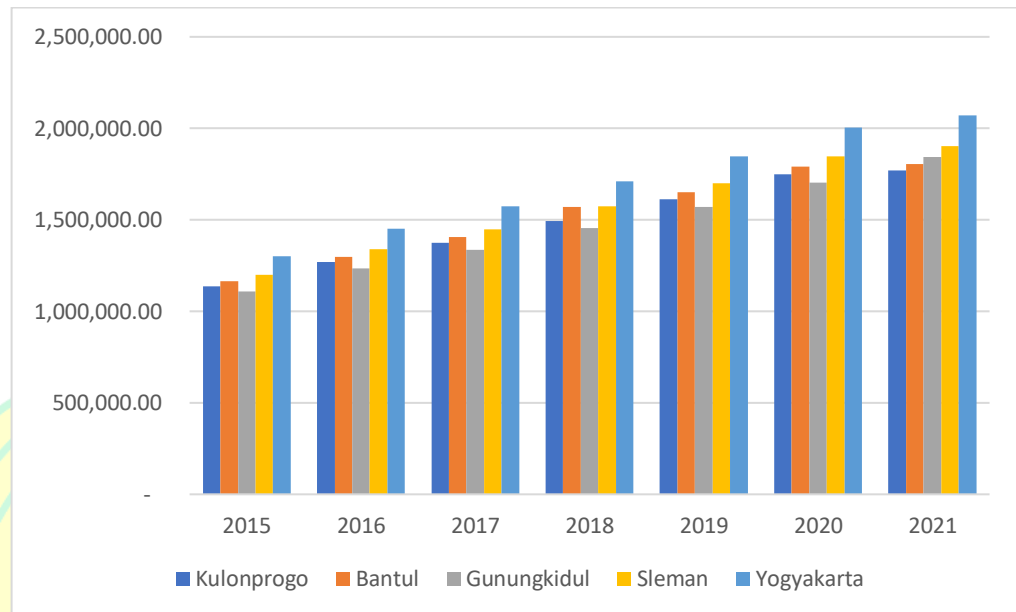
Menurut Suryono (2010) Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diamati melalui fluktuasi perubahan pada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah



Gambar 1.5 Upah Minimum Provinsi di Indonesia

Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan (2021)

Salah satu faktor yang menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi DIY adalah tingkat upah minimum. Pada tahun 2021, Upah Minimum Provinsi (UMP) di DI Yogyakarta terindikasi dengan upah terendah secara nasional, yaitu senilai Rp 1.765.000,-. Beberapa pihak menganggap upah minimum DIY sesuai dengan biaya hidup yang "serba murah" di DIY. Meski upah DIY cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya namun upah tersebut tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat kesulitan untuk keluar dari kemiskinan



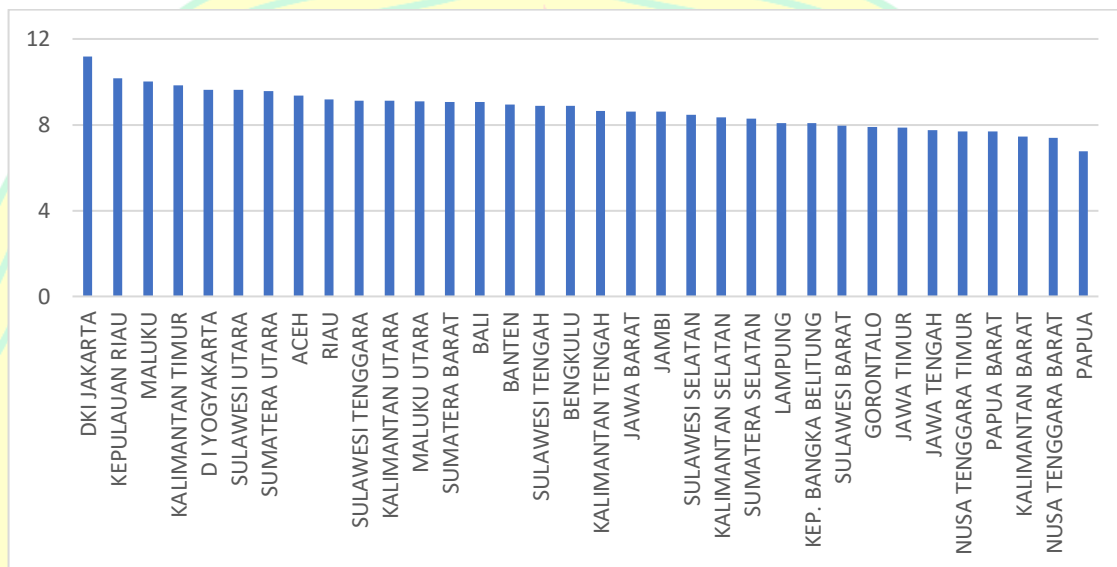
Gambar 1.6 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Kabupaten atau kota secara konsisten mengalami kenaikan upah minimum setiap tahunnya di Provinsi DI Yogyakarta. Daerah dengan upah paling rendah dibandingkan dengan daerah lainnya ialah Kabupaten Gunungkidul, sedangkan daerah dengan upah paling tinggi ditempati oleh Kota Yogyakarta. Tren naiknya upah minimum diharapkan dapat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan untuk hidup yang lebih layak untuk masyarakat umum, dikarenakan naiknya upah minimum tidak memiliki apa-apa jika besarnya sama atau bahkan melebihi jumlah kebutuhan hidup layak di bawahnya.

Seperti halnya UMP, pendidikan dapat mempengaruhi penetapan tujuan dan berkurangnya presentase masyarakat miskin. Dikarenakan pendidikan memberikan peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan melalui penguasaan pengetahuan dan keterampilan, dan hal ini menjelaskan keterkaitan yang erat antara kemiskinan dan pendidikan, seperti yang dikemukakan oleh Suryawati (2005). Dalam penelitian ini, variabel pendidikan dinilai melalui rata-rata lama sekolah atau rata-rata tahun pendidikan yang telah diselesaikan.

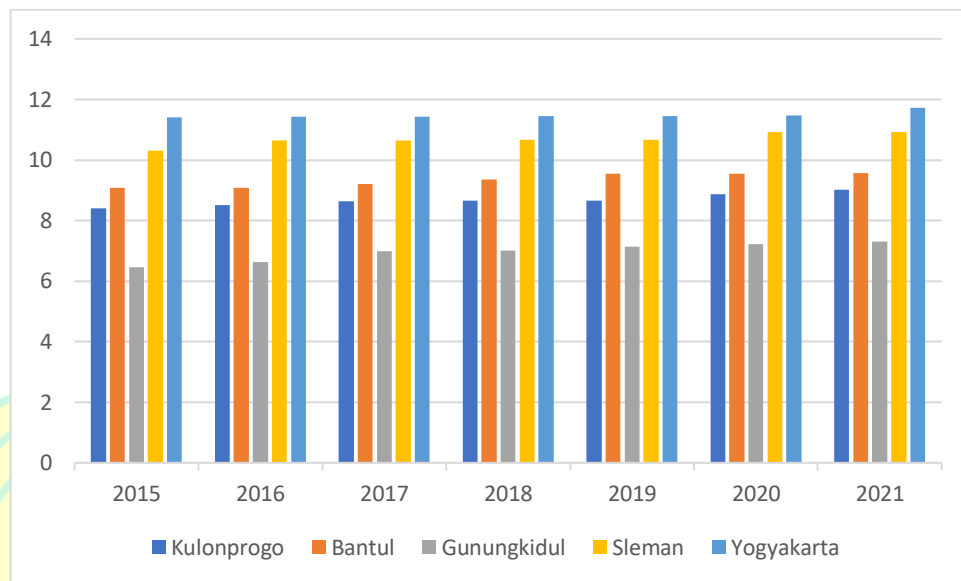
Indikator tahun pendidikan ini bermanfaat untuk menilai kualitas pendidikan formal yang telah ditempuh oleh individu. Berbagai pengetahuan serta keahlian akan secara konsisten mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan seseorang, yang akan berujung pada peningkatan tingkat produktivitas orang tersebut (Muharomi, 2022).



Gambar 1.7 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi di Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Pada tahun 2021, Provinsi DI Yogyakarta menjadi salah satu provinsi tertinggi rata-rata lama sekolah di Indonesia yaitu sebesar 9,74 tahun. Menurut Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DI Yogyakarta, DIY ialah salah satu destinasi unggul tujuan pendidikan Indonesia. Bahkan Ibu kota Provinsi DIY yakni Kota Yogyakarta dijuluki sebagai Kota Pelajar. Julukan ini berasal dari berbagai lembaga pendidikan yang didirikan di Yogyakarta. Lembaga-lembaga ini secara otomatis menarik perhatian siswa dari wilayah lain untuk belajar di Yogyakarta.



Gambar 1.8 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan Gambar 1.8, Kota Yogyakarta menempati posisi pertama dengan tingkat rata-rata lama sekolah mencapai 11,72 tahun pada tahun 2021, sedangkan di Kabupaten Gunungkidul berada di posisi terendah yakni dari 9 tahun mencapai ambang batas Sekolah Menengah Pertama, Kabupaten Gunungkidul hanya mencapai 7,3 tahun. Hal ini terjadi karena tingkat motivasi yang rendah di kalangan siswa Gunungkidul untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagian besar penduduk Gunungkidul lebih memilih untuk bekerja daripada meneruskan pendidikan mereka. Pemerintah Provinsi DIY terus berusaha keras untuk meningkatkan tingkat pendidikan di masyarakat, termasuk rata-rata lama sekolah. Mengimplementasikan program wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu upayanya, namun untuk mencapai rata-rata durasi pendidikan yang tinggi diperlukan keterlibatan dari semua pihak.

Penelitian Kurnia Dwi (2017) menghasilkan kesimpulan bahwa pendidikan memiliki implikasi yang bersifat negatif dan memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan kemiskinan yang mengakibatkan menurunnya presentase penduduk

miskin. Hal ini diungkapkan oleh penelitian Islami & Anis (2019). Dengan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, akan tercipta produktivitas yang tinggi sehingga menurunnya angka kemiskinan. Menurut penelitian Syahrullah (2014), PDRB memiliki dampak positif terhadap kemiskinan. Menurut Kuswanto dan Dewi (2016), pemerintah harus mengambil tindakan dalam menanggapi peningkatan PDRB untuk mengatasi kemiskinan dengan menciptakan lingkungan kerja. Sebagai hasil dari penelitiannya, Muharomi (2022) telah menentukan bahwa upah minimum memiliki kemampuan untuk meningkatkan ambang batas kemiskinan. Ketika upah minimum berada pada tingkat yang rendah, tingkat kemiskinan peningkatan; sebaliknya, ketika upah minimum tinggi, tingkat kemiskinan akan menurun. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi penduduk untuk menghindari atau keluar dari berbagai kondisi kemiskinan

Berdasarkan dari penjabaran diatas dapat diketahui bahwa kemiskinan dapat dipengaruhi oleh PDRB, UMP, dan Pendidikan. Peneliti memiliki ketertarikan menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan di DIY. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah di setiap kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi, dan Pendidikan terhadap Kemiskinan." di DI Yogyakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah PDRB memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di DI Yogyakarta?
2. Apakah UMP memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di DI Yogyakarta?
3. Apakah pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di DI Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan berbagai rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui:

1. Pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di DI Yogyakarta.
2. Pengaruh UMP terhadap kemiskinan di DI Yogyakarta.
3. Pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di DI Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini akan berkontribusi dalam memperluas pengetahuan dan sumber referensi sehingga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya,
2. Manfaat Praktis, diharapkan penelitian ini mampu menjadi landasan bagi pemangku kebijakan dalam membuat keputusan terkait dengan situasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti.